

Bandung Pascakolonial

Oleh: HAWE SETIAWAN

(*Kompas*, Sabtu, 3 Oktober 2009)

Pada mulanya, Bandung dibangun sebagai kota kolonial di awal abad ke-19. Pada gilirannya, kota ini menjadi domain gerakan pascakolonial di pertengahan abad ke-20. Kini, di permulaan abad ke-21, Bandung sedang menjajaki peluang untuk jadi kota metropolitan. Adakah benang merah dalam perubahan sosial demikian?

ISTILAH “pascakolonial” (*postcolonial*) dapat mengacu kepada dua hal. Pertama, periode setelah berakhirnya kolonialisme. Kedua, gugusan gagasan yang mengkaji implikasi pengalaman kolektif zaman kolonial pada berbagai segi kehidupan mutakhir. Masalah yang disoroti meliputi dominasi dan kooptasi, pusat dan pinggiran, persaingan antarkelompok dsb.

Aspek “pasca” jadi penting sebab hal itu mengacu kepada situasi yang pada dasarnya berupa transisi. Kolonialisme itu sendiri tidak sepenuhnya berakhir. Banyak hal yang ditanamkan pada zaman kolonial seakan diteruskan, diwarisi atau dimodifikasi. Pelbagai upaya untuk mengatasi atau menyiasati warisan kolonialisme itu jadi mustahak diperhatikan.

Melihat Bandung dari sudut pandang pascakolonial berarti merefleksikan perubahan sosial di kota tersebut dengan mempertimbangkan masa lalu kolonialnya dan kecenderungan pokok dalam kekiniannya.

Bandung sebagai Kota Kolonial

Konsep “kota kolonial” antara lain dirumuskan oleh Peter J.M. Nas, sarjana Belanda, dalam esainya, “The Colonial City” (1997). Konsepnya bertolak dari studi kasus atas sejarah kota Yogyakarta, Palembang, Batavia Lama, Manado dan Lasem.

Nas mendeskripsikan kota kolonial di Indonesia sebagai ruang yang umumnya terbagi tiga: keraton dan kampung tempat bangsa pribumi, rumah toko tempat bangsa Timur Asing, serta benteng dan kantor pemerintahan tempat bangsa Eropa. Tentu, lain kota lain pula variasinya sehubungan dengan ruang mana yang dominan.

Dari situ Nas mengidentifikasi tiga jenis kota kolonial di Indonesia: “kota keraton” seperti Yogyakarta, “kota pasar” seperti Lasem, dan “kota pemerintahan” seperti Batavia.

Misalkan, kita ikuti kategorisasi rumusan Nas. Dengan itu, Bandung tampak mendekati tipe kota kolonial yang ketiga, yaitu “kota pemerintahan”.

Gambarannya dapat dilihat dalam disertasi Sobana Hardjasaputra mengenai perubahan sosial di Bandung dari 1810 hingga 1906. Kota ini didirikan pada 1810 sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung, kemudian berkembang menjadi *gemeente* (pemerintah kota) Bandung pada 1906.

Bandung sebagai Ikon Pascakolonial

Pada 1955 Bandung menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika. Peristiwa ini menandai bangkitnya negara-negara yang baru merdeka dari kolonialisme Eropa di kawasan Asia dan Afrika.

Bagi Bandung sendiri, pengalaman tersebut menandai perubahan mendasar sehubungan dengan kedudukannya sebagai kota di negara yang baru merdeka. Kota ini, dengan “Semangat Bandung”-nya yang termasyhur, seakan menjadi ikon tersendiri bagi pemikiran dan gerakan pascakolonial.

Tidak mengherankan jika Vera Micheles Dean, ahli hubungan internasional yang menulis buku *The Nature of the Non-Western World* (1957), sampai memakai julukan “the Land of Bandungia” untuk mengidentifikasi negeri-negeri non-Barat yang baru merdeka itu.

Sungguh menarik kita pikirkan betapa kota kolonial yang dibangun pada permulaan abad ke-19 ini pada gilirannya menjadi pembawa semangat gerakan pascakolonial pada pertengahan abad ke-20. Citra seperti ini tampaknya terus hidup hingga kini, bahkan jadi rujukan tersendiri dalam diskursus pascakolonial.

“Apa yang disebut Dunia Ketiga yang muncul sebagai entitas politik menyusul Konferensi Bandung 1955 telah ditelaah secara luas oleh para ahli dalam berbagai bidang seperti Ekonomi, Hubungan Internasional, Pemerintahan, Sejarah, Sosiologi, dan Sastra,” tulis Henry Schwarz dan Sangeeta Ray dalam *A Companion to Postcolonial Studies* (2005).

Bandung sebagai Kota Besar Abad 21

Sekarang, di permulaan abad ke-21, perubahan sosial di Bandung kian pesat. Sehabis Orde Soeharto, Bandung seperti kue tart yang, melalui politik desentralisasi, dikerat jadi tiga: Kota dan Kabupaten Bandung plus Kabupaten Bandung Barat. Penduduknya pun kian berjibun: 1,67 juta jiwa di Kota Bandung, 2,28 juta jiwa di Kabupaten Bandung dan 1,30 juta jiwa di Kabupaten Bandung Barat.

Kota Bandung sendiri, sebagai ibukota provinsi sekaligus etalase budaya Jawa Barat, kini sedang dihadapkan kepada peluang untuk menjadi kota metropolitan. Dengan sendirinya, kota ini memerlukan strategi kebudayaan yang matang, dalam arti mempertimbangkan pelbagai modal sosial dan modal kulturalnya.

Sebegitu jauh, Bandung tampaknya belum banyak beringsut dari citranya sebagai situs kenangan kolonial dan domain turisme pascakolonial. Padahal jika pengalamannya mengarungi perubahan sosial dari zaman kolonial ke zaman pascakolonial dijadikan pijakan tersendiri, Bandung sebetulnya punya banyak potensi untuk mengembangkan diri.

Semangat Bandung yang dicurahkan pada ikhtiar kolektif untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih merdeka dan lebih adil, bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi dunia di sekelilingnya, barangkali tidak berhenti pada dasawarsa 1950-an. Ayo, Bung!***

HAWA SETIAWAN

Penulis lepas, mahasiswa doktoral Sekolah Pasca Sarjana ITB, tinggal di Bandung.